

APROPRIASI PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA PADA ERA REFORMASI

ⁱ*Ruswan

Faculty of Science and Technology, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

*(Corresponding Author):ruswan@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Era Refomasi di Indonesia menghadirkan ekosistem politik yang berdampak pada perkembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU). Perubahan itu meliputi adanya peran yang lebih besar dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam pengelolaan PTNU, pendirian program studi umum yang masif dan perubahan demografi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PTNU. Perkembangan PTNU penting untuk dikaji agar ada pemahaman yang lebih baik terhadap perkembangan pendidikan di kalangan NU, yang telah lama terkenal dengan model pendidikan agamanya baik dalam bentuk pesantren maupun madrasah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memetakan perubahan yang terjadi pada PTNU sejak era reformasi di Indonesia bergulir. Studi ini menggunakan pengumpulan data yang meliputi dokumen, wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan fakta adanya usaha untuk melakukan pengelolaan PTNU secara terpusat dengan dibentuknya Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, adanya penambahan jumlah prodi umum yang signifikan, dan perubahan demografi di kampus PTNU sehingga menjadi lebih heterogen dari segi latar belakang pandangan keagamaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa era reformasi menjadi era perubahan PTNU dari pengelolaan lembaga pendidikan yang berskala lokal ke yang berskala nasional, perubahan dari jenis perguruan tinggi keagamaan ke arah perguruan tinggi umum dan perubahan warga kampus yang semula homogen menjadi heterogen. Perkembangan dan perubahan trend di PTNU tersebut menjadi bukti adanya proses apropriasi di PTNU, yang dengannya nilai-nilai luar diserap dan dimodifikasi sehingga PTNU dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

PENDAHULUAN

PTNU mengalami perkembangan yang signifikan pasca reformasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tiga hal meliputi pengelolaan PTNU yang semakin sentral, pembukaan program studi umum yang masif dan perubahan demografi kampus menjadi lebih heterogen. Perkembangan dan trend baru PTNU terjadi karena adanya proses apropriasi, yaitu proses adopsi model-model pendidikan baru dengan modifikasi tertentu sehingga dapat sesuai dengan nilai-nilai dan kultur yang hidup di lingkungan PTNU. Perkembangan dan trend baru PTNU tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah era reformasi yang semakin bersahabat dengan Nahdlatul Ulama. NU yang lama mengalami masa sulit pada masa Orde Baru karena kurangnya kesempatan untuk bisa berkembang, seperti mendapatkan angin segar untuk membesarkan Jamiyah melalui berbagai program dan kegiatannya, termasuk di dalamnya adalah program di bidang pendidikan.

Kajian tentang Nahdlatul Ulama sejauh ini lebih menekankan kedudukan dan peran NU secara politik sehingga mengabaikan dimensi kultural dan intelektual keberadaan NU (VSVSGG, 2018; VDD, 2019). NU sesungguhnya merupakan gerakan kultural yang memiliki basis massa yang sangat signifikan (BSHBD, 2017). Posisi ini memungkinkan NU mempengaruhi transformasi secara meluas dalam masyarakat. Pada saat yang sama NU telah terlibat dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan sekolah Ma'arif (DGVGD, 2016). Posisi NU sebagai kekuatan pendidikan yang memberi warna terhadap pengembangan SDM di Indonesia kurang diperhatikan. Sejalan dengan itu pemahaman tentang bagaimana keterlibatan NU dalam dunia pendidikan dalam lintasan sejarah menjadi penting untuk dikaji. Kajian pendidikan NU telah banyak dilakukan dengan fokus utama pesantren dan

madrasah, sementara perkembangan perguruan tinggi NU yang cepat khususnya di era reformasi belum mendapatkan perhatian.

Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji kelembagaan NU sebagai kekuatan politik. Tulisan ini menempatkan NU sebagai kekuatan intelektual yang memiliki peran transformasional dalam masyarakat. Sejalan dengan itu dalam tulisan ini hendak menjelaskan perkembangan pesat perguruan tinggi NU di era reformasi yang dilihat pada tiga dimensi, yakni; pengelolaan yang tersentralisasi, pembukaan program studi umum, dan perubahan demografi kampus yang heterogen. Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bagaimana konteks sosial politik memungkinkan terjadinya suatu perkembangan kelembagaan organisasi Islam di Indonesia.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa era reformasi telah menjadi ekosistem yang subur untuk perkembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Kebijakan-kebijakan pemerintah era reformasi memudahkan warga NU untuk merealisasikan keinginannya untuk mengembangkan PTNU. Perkembangan keterlibatan NU dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan posisi tawar NU dalam bidang politik. Dengan demikian dalam era reformasi ini telah terjadi "*wihdatul iradah*" (kesatuan kehendak) antar pemerintah dan NU sebagai representasi kekuatan masyarakat sipil, yang pada akhirnya membuka jalan yang lebar untuk berkembangnya PTNU.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterlibatan NU dalam pendidikan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang menganut faham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah yakni sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem rasionalis (mu'tazilah) dan kaum ekstrem literalis (salafi/wahabi) (Arif, 2018). Dalam bahasa NU, prinsip ini dikenal dengan istilah *tawasuth* (jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan dan keselarasan), *i'tidal* (teguh dan tidak berat sebelah), dan *iqtishad* (bertindak seperlunya dan sewajarnya, tidak berlebihan) (Adli et al., 2020). Dalam perkembangannya, NU berkomitmen untuk membangun bangsa dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Keterlibatan NU dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai lembaga dan ruang yang digunakan dalam mendidik masyarakat. NU memaksimalkan perannya dalam pendidikan melalui jalur formal dan informal yakni pesantren, madrasah, perguruan tinggi, tarekat, masjid, mushalla, majlis ta'lim dan rumah-rumah anggotanya sebagai sarana pendidikan yang mana hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam untuk bangsa Indonesia ke depan (Fatimah, 2018). Selain itu, Felay menunjukkan keterlibatan konkrit Nahdlatul Ulama (NU) dalam pendidikan yang nampak dari didirikannya lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan yaitu lembaga ma'arif NU (Arif, 2018).

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang memiliki corak pemikiran yang khas (Dianita et al., 2019). Corak yang khas tersebut nampak pada proses belajar mengajarnya yang berasaskan pada Ahlul-sunnah wal Jama'ah dengan nilai-nilai yang sangat fleksibel dalam menghadapi segala situasi dan kondisi di dalam masyarakat (Rofiq & Ridwan, 2019). Untuk pelajaran agama, lembaga ini juga merekrut para kiai guna mengajarkan ajaran Ahlul-sunnah wal Jama'ah tersebut. Dalam hal ini, kiai memiliki kekuatan spiritual dan institusional di dalam dinamika NU. Lembaga pendidikan yang menaunginya juga telah berkomitmen untuk mengajarkan pelajaran khusus ke-NU-an atau sejarah NU, dan hagiografi para pendirinya. Meskipun pendidikan NU cenderung berbasis tradisi pondok pesantren dengan barisan kiai sebagai inti dan pusatnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa NU juga memusatkan perhatian besar pada sekolah dan madrasah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif (Felliard dalam Hakam, 2017). Hal ini berarti terdapat juga madrasah dan sekolah yang bercorak modern—selain pondok pesantren—karena berusaha mengikuti model-model pendidikan, pedagogi, atau sistem pengajaran secara sungguh-sungguh (Felliard dalam Hakam, 2017).

Nahdlatul Ulama dan Perkembangan Pendidikan Tinggi

Tuntutan modernisasi organisasi dan dorongan pemerintah di era reformasi menjadi pemicu pendirian pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama seperti sekolah akademi, sekolah tinggi, dan universitas.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi platform pengembangan kebijakan dalam Nahdlatul Ulama. NU melakukan pengembangan masyarakat dan menjadikan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan intelektualitas. Lewat para kiai dan santri, NU telah mendirikan lembaga pesantren yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.

Dalam perkembangannya, selain berfokus pada pendidikan di pesantren dan madrasah, NU menunjukkan gagasan yang progresif dengan mendirikan perguruan tinggi di berbagai daerah dengan tetap mempertahankan basis tradisional yang menjadi ciri khas NU. Pendirian perguruan tinggi di kalangan NU memberikan pengaruh perubahan aspek sosio-kultural. Hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, arah organisasi, dan perubahan perilaku para anggota NU yang lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan globalisasi yang mengharuskan modernisasi lembaga pendidikan. Selain itu, ciri khas sosio-kultural dalam pengembangan pendidikan tinggi di kalangan NU juga harus tetap dipertahankan. Di kalangan NU misalnya, pendirian pendidikan tinggi berkembang dan didirikan di tengah-tengah lembaga pendidikan Pesantren yang menjadi embrio pengembangan lembaga pendidikan NU.

Apropriasi Pendidikan

Apropriasi merupakan sebuah fundamental psikologis dengan proses dan intervensi pada sebuah ruang yang diekspresikan untuk mengubah dan mempersonalisasikannya ke dalam kelompok atau komunitas tertentu (Mifsud et al., 2015). Jika diintegrasikan dengan pendidikan, apropriasi pendidikan memiliki konsep sebagai proses dimana pengguna mengadopsi, mengadaptasi, dan menggabungkan sistem pendidikan tertentu dalam praktik, pekerjaan atau waktu luangnya. Ini sebagai sebuah adopsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai tertentu ke dalam pendidikan (Herodotou et al., 2012). Apropriasi sebagai sebuah media dalam mengadopsi sesuatu dapat menjadikan pendidikan sebagai media apropriasi itu sendiri. Pendidikan menjadi fungsi untuk melakukan apropriasi dengan memberikan keterampilan dan nilai-nilai tertentu kepada siswa untuk kemajuan sosial dan kemajuan pengetahuan. (Kim & Song, 2021). Integrasi nilai-nilai budaya tertentu ke dalam pendidikan dapat menjadi aspek sentral dari proses sosialisasi nilai budaya melalui tanda-tanda dan alat-alat budaya serta masyarakat dari budaya tersebut terutama dengan memahami dan menghubungkan dengan wacana-wacana ilmiah (Würfel, 2014). Secara umum, apropriasi pendidikan menjadi sebuah proses integrasi nilai-nilai secara menyeluruh ke dalam pendidikan.

Hadirnya apropriasi pendidikan dapat memunculkan beberapa dampak positif pada ruang akademik. Pertama, munculnya peluang untuk lahirnya pengetahuan baru (Al-Kurdi et al., 2018). Pengetahuan yang diappropriasi akan memiliki berbagai percampuran baik dihasilkan dari metode maupun struktur pembelajaran. Kedua, memunculkan motivasi untuk melakukan asimilasi pengetahuan. Pengajaran yang dilakukan melalui perspektif orang luar yang sesuai dengan pengajaran yang diinginkan lembaga pendidikan akan memotivasi pada hadirnya asimilasi pengetahuan (Vlieghe & Zamojski, 2020). Ketiga, akses ke pengetahuan (Leko & Brownell, 2011). Apropriasi sebagai sebuah kebutuhan dalam menghasilkan pengetahuan baru sehingga ini menjadi media dalam mengakses pengetahuan-pengetahuan baru (Indrajaya, 2017). Dampak yang dihasilkan dari apropriasi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ideologi dan nilai tertentu seperti kurikulum, pemilihan guru, pemilihan murid, dan struktur pendidikan yang dipilih (Bourlès et al., 2018). Semua dampak yang dirasakan juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosiologis, politik, moralistik, pandangan tentang makna dan tujuan pengajaran. Sehingga apropriasi dapat dirasakan dampaknya bagi pertumbuhan dunia pendidikan.

Bentuk dan Fungsi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan institusi satuan pendidikan yang menggelar program pendidikan tinggi untuk peserta didik melalui aktivitas transfer pengetahuan dan ilmu pengetahuan (Chinta et al., 2016). Merujuk pada bentuk-bentuknya, perguruan tinggi terbagi ke dalam dua kategori yakni, berdasarkan sistem pendidikan dan jenis ilmunya seperti universitas, sekolah tinggi, dan politeknik, serta didasari atas bagaimana pengelolannya, misalnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) (Handayani, 2015; Arifin, 2017). Adapun dalam konteks tulisan ini, pendidikan tinggi yang dimaksud adalah pendidikan tinggi yang berada di bawah

payung Nahdlatul Ulama (NU) yang mana perguruan tinggi tersebut mengacu pada nilai-nilai keislaman. Hal ini senada dengan Hasan dkk (2015) yang mengatakan bahwa pelaksanaan belajar mengajar di perguruan tinggi islam berpegang pada Al-qur'an dan Hadits. Kurikulum yang dipakai juga tetap melibatkan nilai-nilai keislaman pada muatan kurikulum standar nasional yang digunakan (Nasrudin et al., 2019). Namun demikian, pengajaran yang dilakukan tetap melibatkan asas inovatif dan transformatif yang berada pada koridor semestinya dan tidak menjauhi ideologi-ideologi islam (Abdullah, 2017).

Adapun tujuan pendidikan tinggi tidak mutlak satu, melainkan dapat berubah dan mengadopsi bentuk baru seiring perkembangan waktu (Ford, 2017). Namun demikian, fungsi umum yang paling sering disebut-sebut di dalam riset mengenai pendidikan tinggi adalah fungsi ekonominya (Ford, 2017; Kromydas, 2017; Sakhiyya & Rata, 2019). Pendidikan tinggi dengan gelar yang diperoleh pasca menempuhnya menjadi sesuatu yang tak lagi sepenuhnya dipandang sebagai institusi pendidikan, melainkan penentu karir yang berkaitan erat dengan pasar tenaga kerja dan perekonomian (Kromydas, 2017). Selain itu, pendidikan tinggi sebagai agen transformasional juga berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan. Melalui aktivitas belajar-mengajar yang mengedepankan terciptanya pola pikir kritis, pendidikan tinggi membantu dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam upaya-upaya seperti pengentasan kemiskinan, promosi kesehatan dan kesejahteraan hidup, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, pangan, perubahan iklim, hingga perdamaian dan keadilan (Žalėnienė & Pereira, 2021). Pentingnya kontribusi pendidikan tinggi dalam pembangunan ekonomi-sosial tersebut berpengaruh pada bagaimana sistem dan institusi-institusi pendidikan tinggi berjalan. Mereka akan mendapati beberapa tekanan atas tuntutan dari peran dan fungsinya yang dipandang cukup krusial tersebut (Rumbley et al., 2014).

METODE

Perkembangan Perguruan Tinggi NU di Era Reformasi dipilih sebagai objek material dari tulisan ini, karena dalam bidang pendidikan, NU lebih dikenal dengan pesantren tradisionalnya, madrasah-madrasah dan perguruan tingginya dengan titik berat pada studi Islam. Era reformasi menghadirkan trend baru dari pendidikan NU dengan berdirinya PTNU dengan program studi umum, pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih tersentral, dan semakin beragamnya latar belakang dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di PTNU. Ketiga trend yang ada di perguruan tinggi ini belum mendapatkan perhatian peneliti.

Tulisan ini didasarkan pada berbagi sumber dokumen, wawancara dan observasi. Dari dokumen yang ada dapat diperoleh data statistik tentang jumlah Perguruan Tinggi NU, dimana dan waktu berdirinya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui banyak hal mengenai perkembangan PTNU dari waktu ke waktu, disamping untuk memvalidasi data-data kuantitatif terkait perkembangan PTNU yang diperoleh dari dokumen. Observasi dilakukan ke beberapa PTNU, sehingga dinamika dan atmosfer yang sekarang ada pada PTNU bisa lebih dilihat dan dirasakan secara langsung.

Reponden penelitian ini meliputi Pimpinan Yayasan, Pimpinan APTINU Periode 2009-2015, Pimpinan LPTNU periode 2015-2021 dan beberapa Pimpinan PTNU yang masih aktif. Mereka dipilih secara purposive sampling karena dari mereka dapat diperoleh informasi mengenai arah perkembangan PTNU dari sebelum era reformasi sampai setelah era reformasi.

Penelitian ini dimulai dari kajian atas data-data yang diperoleh melalui media online, utamanya dari Website yang memuat berita dan data tentang PTNU. Selanjutnya dilakukan observasi ke beberapa PTNU antara lain UNWAHAS (Universitas Wahid Hasyim Semarang) dan UNU Purwokerto dan wawancara dengan berbagai responden yang reliabel.

Data-data penelitian yang terkumpul dari berbagi sumber dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Data-data yang diperoleh melalui wawancara ditafsirkan setelah dilakukan triangulasi dengan data-data lain yang diperoleh dari berbagai sumber.

TEMUAN

Sejak munculnya era reformasi telah terjadi perubahan arah pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Perubahan arah pengembangan PTNU ini dapat dijelaskan dalam tiga dimensi perkembangan berikut: pertama, sentralisasi pengelolaan PTNU; kedua, pembukaan program studi umum; ketiga, keberadaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PTNU yang lebih beragam.

i. Sentralisasi Pengelolaan PTNU

Era reformasi melahirkan tradisi baru dalam pengelolaan Perguruan Tinggi NU dimana PTNU mulai dikelola secara sentral oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru pendirian dan pengelolaan PTNU dilakukan oleh Yayasan-yayasan lokal yang para pemiliknya/pengurusnya secara kultural berafiliasi ke NU. Di Jawa Tengah misalnya, dapat ditemukan beberapa yayasan yang berhasil mendirikan Perguruan Tinggi. YAPTINUS (Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta) mendirikan UNU Surakarta. YAPTINU (Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama) Jepara mendirikan INISNU, yang pada tahun 2013 berubah menjadi UNISNU Jepara. Contoh yang lain adalah Yayasan Wahid Hasyim Semarang, yang mendirikan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yayasan-yayasan ini berjalan sendiri-sendiri di tingkat lokal.

Memasuki era reformasi muncul inisiatif untuk membentuk wadah yang bisa menyatukan pengelolaan PTNU seluruh Indonesia. Wadah tersebut terbentuk pada tahun 2009 dengan nama APTINU (Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama) yang secara struktural berada di bawah Lembaga Pendidikan Maarif NU yang waktu itu sebenarnya lebih fokus melakukan pembinaan lembaga pendidikan NU tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada awal terbentuknya APTINU terdapat 81 PTNU seluruh Indonesia yang bergabung dengan sebaran sebagaimana ada dalam Tabel 1.

Table 1
SEBARAN PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA

No.	PROVINSI	JUMLAH
1.	Bali	2
2.	DKI Jakarta	7
3.	Jawa Barat	13
4.	Jawa Tengah	13
5.	Jawa Timur	35
6.	Kalimantan Selatan	1
7.	Kalimantan Tengah	1
8.	Kalimantan Timur	1
9.	Lampung	1
10.	NTB	1
11.	NTT	1
12.	Sulawesi Selatan	3
13.	Sulawesi Utara	1
14.	Sumatera Utara	1
	Jumlah	81

Sumber Data: Profil dan Direktori NU, 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran PTNU belum merata di seluruh wilayah Indonesia. PTNU masih terkonsentrasi di Jawa (khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini PTNU mencapai 51 (62 %). Demikian pula baru 14 provinsi yang memiliki PTNU. Kondisi tersebut sejalan dengan eksistensi organisasi NU, dimana massa NU mayoritas berada di Pulau Jawa. Dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas PTNU, pemikiran untuk memiliki wadah pembinaan yang lebih kuat muncul pada Rakornas APTINU tahun 2009. Ketua APTINU Noor Ahmad di sela-sela Penutupan Rakornas APTINU yang berlangsung pada tanggal 15 sd. 17 oktober 2009 di Hotel Treva Jakarta mengatakan, “Kita harapkan ke depan APTINU menjadi lembaga sendiri”. Harapan terwujud pada tahun 2015 ketika Mukhtar NU ke 33 di Jombang Jawa Timur.

Paska Mukhtamar tahun 2015 di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk lembaga yang secara khusus mengelola Pendidikan Tinggi yang bernama Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU). Lembaga baru ini dipimpin oleh Mochammad Nasir, yang pada saat itu sedang menjabat Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan adanya LPTNU pengelolaan PTNU di seluruh Indonesia lebih terpusat, meskipun karena alasan historis dan teknis keberadaan Yayasan-yayasan masih tetap dipertahankan. Selain mengkoordinasikan pembinaan PTNU yang telah ada sebelumnya, Pimpinan Pusat LPTNU mulai mendirikan Perguruan Tinggi Baru. Data sebaran pengelolaan PTNU setelah berdirinya LPTNU sebagaimana dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2
BADAN HUKUM PENYELENGGARA PTNU

NO	BENTUK BADAN HUKUM	Jumlah	%
1.	NU	22	8,08
2.	Yayasan	252	92,02
		272	100

Sumber: Dokumentasi Pimpinan Pusat LPTNU Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan sudah adanya PTNU yang didirikan dan dikelola secara langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPTNU) sebanyak 22 PTNU (8,08 %). 252 (92,02) lainnya masih dikelola oleh Yayasan lokal dengan pembinaan dari Pimpinan Pusat LPTNU. (Wawancara dengan Muhammad Afifi, Sekretaris PP LPTNU, tanggal 3 Juni 2021).

ii. Pembukaan Program Studi Umum

Keinginan untuk membuka program studi non studi Islam sebenarnya telah ada pada tahun 1980an, akan tetapi keinginan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu sebelum era reformasi hanya beberapa PTNU saja yang memiliki program studi umum, seperti Akademi Keperawatan (AKBID) yang didirikan oleh YARSIS (Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya) pada tahun 1979. Yayasan NU di tempat lain lebih memilih mendirikan PTNU untuk studi Islam dengan berbagai program studinya. Alasannya karena kemudahan mendapatkan dosen dengan kompetensi ilmu agama Islam dibanding mereka yang memiliki kompetensi ilmu umum.

Era reformasi menghadirkan situasi yang kondusif untuk perkembangan Perguruan Tinggi NU. Keberadaan dua kader NU, Moh. Nuh dan Muhammad Nasir di Kementerian Pendidikan, membuat keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi dengan program studi umum dapat dengan lebih mudah diwujudkan. Pada masa Moh. Nuh, DEA menjadi Menteri Pendidikan Nasional (2009-2014), banyak Perguruan Tinggi dapat didirikan, misalnya Akademi Komunitas Balekambang Jepara Jawa Tengah (2013) UNUSA Surabaya (2013), UNU Nusa Tenggara Barat (2014), UNU Kaltim (2014), UNU Sumatera Utara (2014), dan UNUGHA Cilacap (2014), dan UNUSIA Jakarta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mudzakir:

"Bahwa era reformasi ini merupakan berkah bagi kalangan Nadhiyin, karena banyak perguruan tinggi yang muncul setelah reformasi." (Wawancara dengan Akhmad Mudzakir, Ketua Pimpinan Wilayah LPTNU Jawa Tengah, 10 Juni 2021)

Pada masa menteri Muhammad Nasir (2014-2019) Perguruan Tinggi NU baru dengan program studi umum terus bertambah, bersamaan pula terus muncul pembukaan program studi baru pada Perguruan Tinggi NU yang sudah ada. Misalnya, pada 29 Maret 2016 Universitas Wahid Hasyim Semarang, mendapatkan ijin pembukaan Program Studi Kedokteran dari Kemenristek Dikti. Beberapa PTNU baru muncul atas prakarsa PBNU secara langsung, misalnya UNUSIA Jakarta (2015) UNU Purwokerto (2016), dan Institut Teknologi dan Sains NU Pekalongan (2018).

Hasil dari perkembangan Perguruan Tinggi NU dapat dilihat pada Table 3 berikut:

Tabel 3
JENIS DAN JUMLAH PERGURUAN TINGGI NU TAHUN 2021

No.	JENIS PTNU	JUMLAH	%
1.	UNIVERSITAS	47	17,15
2.	INSTITUT	33	12,04
3.	SEKOLAH TINGGI	178	64,96
4.	AKADEMI	15	5,47
5.	POLITEKNIK	1	0,36
	JUMLAH	274	100

Sumber: Dokumentasi Pimpinan Pusat LPTNU Tahun 2021

Dalam tabel di atas dapat dilihat PTNU dalam bentuk Universitas (17,15 %), Institut (12,04 %), Sekolah Tinggi (64%), Akademi (10 %) dan Politeknik (7,5%). Sesuai dengan program studi yang diselenggarakan, 83 (30,29 %) PTNU berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan 191 (69,70 %) lainnya di bawah pembinaan Kementerian Agama

iii. Keberadaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di PTNU dengan latar belakang yang lebih beragam

Konsekuensi dari pembukaan program studi non studi Islam adalah masuknya dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang pandangan keagamaan Islam yang lebih beragam. Hal ini karena di internal NU sendiri belum mampu menyediakan sepenuhnya dosen yang memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan semua program studi yang dibuka. Diketahui bahwa sejak pendiriannya NU lebih banyak mengembangkan pendidikan keagamaan Islam melalui jalur formal (madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) dan jalur informal melalui Pondok Pesantren. Oleh karena itu dalam rangka pendirian Perguruan Tinggi dengan program studi non studi Islam NU harus menjadi terbuka dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. Menurut Muhyiddin Dawud, Wakil Rektor UNU Purwokerto,

"Di UNU Purwokerto terdapat 5 % dosen dengan latar belakang ormas non NU."

(Wawancara dengan Muhyiddin Dawud, 5 Juni 2021).

Fenomena lain yang menarik dari perkembangan Perguruan Tinggi NU adalah PTNU menjadi sarana untuk mengumpulkan kembali para "diaspora Nahdliyin", yaitu warga NU yang berkarir di luar lembaga NU, baik pemerintah maupun swasta. Setelah berdiri PTNU mereka terpanggil untuk ikut membesarkan "rumah sendiri". Tidak bisa disebutkan berapa banyak jumlah mereka, tetapi menjadi fenomena umum dari PTNU dengan program studi umum. Jumlah mereka di PTNU baru bervariasi tergantung pada ketersediaan "diaspora Nahdliyin" di daerah setempat dan kebutuhan program studi yang dibuka. Haryadi, Rektor ITS NU Pekalongan menuturkan:

"Saya ini dosen di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Rektor UNU Purwokerto saat ini (ed.2021), Rochadi Abdulhadi, sebelumnya menjabat di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Rektor sebelumnya, Achmad Shodiq, jadi salah satu Wakil Rektor di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto." (Wawancara dengan Haryadi, 11 Juni 2021)

Pembukaan program-program studi non studi islam juga menarik minat masyarakat dari latar belakang yang beragam untuk mendaftar di Perguruan Tinggi NU. Sebagai contoh, di Universitas Wahid Hasyim Semarang, terdapat mahasiswa dari berbagai daerah di dalam negeri dan beberapa mahasiswa dari luar negeri (Thailand dan Afghanistan). Mudzakir menjelaskan:

"Mereka tidak hanya yang berlatarbelakang keluarga Nahdliyin tetapi juga dari berbagai ormas Islam lain, bahkan ada juga mahasiswa dari latar belakang etnis Cina dan non Muslim." (Wawancara dengan Akhmad Mudzakir, Ketua LPNU Jawa Tengah, juga Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, 10 Juni 2021)

Dengan kondisi tersebut PTNU tidak hanya menjadi Perguruan Tinggi para Nahdliyin tetapi juga menjadi pilihan semua kalangan masyarakat dengan aneka macam latar belakang bangsa, suku, agama atau keyakinan keagamaan. Kondisi yang demikian tidak pernah dijumpai ketika PTNU masih terfokus pada kajian ilmu-ilmu agama Islam.

PEMBAHASAN

Era reformasi menghadirkan ekosistem yang baik bagi pertumbuhan Perguruan Tinggi NU. Studi ini memperlihatkan bahwa PTNU mengalami perkembangan yang positif pasca reformasi dengan sentralisasi pengelolaan Perguruan Tinggi NU dengan adanya peran yang semakin besar dari PBNU dan keberadaan LPTNU. Bersamaan dengan itu, ada trend yang semakin kuat untuk pendirian program studi non studi Islam yang diyakini prospektif bagi alumni untuk masuk ke pasar kerja. Pembukaan prodi-prodi umum tersebut telah menjadikan kampus Perguruan Tinggi NU sebagai lingkungan sosial yang heterogen yang memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif antara Nahdliyin dengan mereka yang memiliki latar belakang yang beragam, baik dalam kapasitasnya sebagai dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Semua itu bisa terjadi karena ada PTNU melakukan proses apropriasi nilai-nilai baru tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamental yang hidup di kalangan Nahdliyin.

Perkembangan Perguruan Tinggi NU seperti tersebut di atas tidak lepas dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal, warga NU sudah tidak lagi memiliki hambatan ideologis untuk belajar ilmu umum. Bahkan sebaliknya yang berkembang adalah "teologi pembangunan" "yang memuat memuat orientasi dan motivasi yang serupa, yakni bertolak dari keyakinan keagamaan yang abadi, kepada usaha praksis penyelesaian problem yang sedang dihadapi masyarakat." (Mahbib Khoiron, 2021), Secara internal juga, mulai banyaknya warga NU yang memiliki keahlian di luar ilmu keislaman. Sehingga ketergantungan terhadap SDM luar NU tidak terlalu besar. Secara eksternal, NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan semakin diakui perannya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ini tentu merupakan dampak positif dari era reformasi yang memuluskan jalan Nahdliyin untuk masuk dalam struktur pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi lebih ramah dan bersahabat (*friendly*) pada NU. Salah satunya adalah pemberian konsesi lahan kepada NU yang disampaikan pada Mukhtar NU yang ke 34 di Lampung. Kata Jokowi "Saya sudah siapkan. Enggak mungkin saya memberikan ke NU itu yang kecil-kecil, saya pastikan yang gede. Insya Allah yang gede." (CNBC Indonesia, 31 Januari 2022)

Perkembangan program studi di Perguruan Tinggi NU bisa menjadi faktor yang positif agar peran NU dalam pembangunan masyarakat lebih luas, lebih dari peran di bidang agama. Di era reformasi NU mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di bidang pemerintahan dan BUMN dengan banyaknya menteri dan pejabat BUMN yang memiliki latar belakang NU. Di sektor swasta tuntutan peran kader-kader NU juga semakin besar sejalan dengan kepercayaan masyarakat terhadap NU yang selalu menekankan moderasi khususnya dalam bidang keagamaan. Kebutuhan akan sumberdaya NU yang semakin besar akan bisa dipenuhi manakala PTNU secara terus menerus melakukan perbaikan dan memperhartikan prinsip kesesuaian dengan tuntutan zaman. Di samping itu, perkembangan PTNU di era reformasi menandakan adanya hubungan yang baik antara NU sebagai kekuatan masyarakat sipil dengan pemerintah. Kalau hubungan baik ini terus bisa dipertahankan maka PTNU akan memiliki potensi untuk terus berkembang dan bisa menjadi setara dengan Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang telah lebih dahulu menikmati bantuan dari pemerintah.

Hasil dari penelitian memperkuat temuan terdahulu tentang pendidikan Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah penelitian Ani Jayanti yang melakukan penelitian tentang Kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah temuannya adalah bahwa lembaga pendidikan NU pada umumnya tidak menggunakan nama NU akan tetapi menggunakan nama yayasan penyelenggara lokal yang didirikan oleh warga NU. (Ani Jayanti., 2016). Oleh karena itu tepat sekali kemudian ketika salah satu upaya pengembangan PTNU adalah melalui sentralisasi pengelolaan PTNU melalui Lembaga Pendidikan Tinggi NU.

Penelitian ini menunjukkan adanya fenomena yang positif terkait dengan adanya pertumbuhan jumlah PTNU di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya

kebijakan pemerintah yang semakin kondusif dan adanya kemauan internal Nahdliyin untuk secara terus menerus meningkatkan layanannya kepada umat dan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Pertambahan jumlah PTNU yang cepat di era reformasi ini hendaknya diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan NU yang didukung oleh jumlah dosen yang kompeten dan memadai, sarana dan prasarana yang lengkap dan tata kelola PTNU yang lebih akuntabel. PTNU juga perlu menjaga dirinya agar mampu menjadi Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh semua kalangan. Untuk itu PTNU perlu menjaga dirinya agar tetap menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terbuka terhadap keragaman suku, agama dan kepercayaan. Yang paling utama lagi adalah PTNU seharusnya secara terus menerus melakukan apropriasi agar bisa setara atau bahkan lebih maju dari Perguruan Tinggi lain yang telah berdiri sebelumnya.

KESIMPULAN

Perkembangan perguruan tinggi NU di Indonesia tidak terlepas dari tumbuhnya kembali gairah ber-NU di usianya yang hampir satu abad. Suasana batin itu merupakan salah satu buah "kemerdekaan" yang selama Orde Baru dirasakan hilang oleh warga NU. Pada masa itu sekolah-sekolah dan madrasah NU pun tidak berani menggunakan nama NU. Kemudian banyak yayasan dengan nama yang bermacam-macam berdiri, sebagai "sekoci" untuk menyelamatkan lembaga pendidikan NU yang bisa musnah karena kebijakan Orde Baru. Di era reformasi tumbuh keberanian untuk menunjukkan identitas keNUan, maka yayasan-yayasan yang semula dijadikan alat untuk mengamankan lembaga pendidikan secara bertahap dinonaktifkan. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) didirikan untuk menjadi wadah bernaungnya seluruh PTNU. Nahdliyin berharap dari Perguruan Tinggi NU akan lahir para alumni yang siap jadi lokomotif kemajuan umat dan bangsa.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial dan pendidikan NU sangat menarik perhatian dari para peneliti baik dalam maupun luar negeri. Akan tetapi penelitian-penelitian kebanyakan difokuskan pada dimensi politik dari NU. Sayangnya kemudian perhatian terhadap dimensi ini juga lebih fokus pada capaian kekuasaan oleh para kader NU baik di legislatif maupun eksekutif. Padahal secara ideal tercapainya kekuasaan itu bukan tujuan akhir dari perjuangan politik NU. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai dampak dari era reformasi terhadap perkembangan pendidikan tinggi NU, yang merupakan salah satu domain penting dari gerakan Nahdlatul Ulama. Diyakini bahwa kekuatan NU di masa depan akan tergantung pada kemampuannya untuk melakukan pembaharuan Pendidikan Tinggi NU sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Penelitian ini baru melihat perkembangan Perguruan Tinggi NU secara kuantitatif, untuk melihat trend perkembangan PTNU. Aspek kualitas dari PTNU belum dilihat baik dari akreditasi kelembagaan Perguruan Tinggi maupun program studi, pengelolaan bidang akademik, produksi ilmu dari Perguruan Tinggi NU dan prestasi mahasiswanya. Dalam jangka panjang penelitian terkait dengan peran alumni PTNU di masyarakat juga perlu dilakukan, untuk melihat sebesar apa buah dari investasi NU dalam bidang pendidikan tinggi yang sekarang sedang dilakukan.

RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2017). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects for the world community. *Al-Jami'ah*. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>
- Adli, I. M., Kamal, M., & Darmoko, P. D. (2020). Konsep Pendidikan Dakwah Nu. *Madaniyah*, 10(2), 225–250.
- Al-Kurdi, O., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2018). Knowledge sharing in higher education institutions: a systematic review. In *Journal of Enterprise Information Management*. <https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2017-0129>
- Arif, M. (2018). REVITALISASI PENDIDIKAN ASWAJA AN NAHDLIYAH (KE-NU-AN) DALAM MENANGKAL FAHAM RADIKALISME DI SMK AL-AZHAR MENGANTI GRESIK. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.18860/jpai.v5i1.6052>
- Arifin, A. (2017). Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin diperguruan tinggi.

- EDUTECH Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3 No 1(1), 117–132.
- Bourlès, R., Ventelou, B., & Woode, M. E. (2018). Child Income Appropriations as a Disease-Coping Mechanism: Consequences for the Health-Education Relationship. *Journal of Development Studies*. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1274393>
- Chinta, R., Kebritchi, M., & Ellias, J. (2016). A conceptual framework for evaluating higher education institutions. *International Journal of Educational Management*. <https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2015-0120>
- Dianita, G., Firdaus, E., & Anwar, S. (2019). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI SEKOLAH: Sebuah Kearifan Lokal di Sekolah Nahdlatul Ulama. *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education*. <https://doi.org/10.17509/t.v5i2.16752>
- Fatihah, I. (2018). PERAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM BIDANG PENDIDIKAN KARAKTER. *Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v3i2.3116>
- Ford, M. (2017). The Functions of Higher Education. *American Journal of Economics and Sociology*. <https://doi.org/10.1111/ajes.12187>
- Hakam, S. (2017). Menjadi Modern dan Religius: Perguruan NU di Blitar 1950an-1970an. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*. <https://doi.org/10.28926/briliant.v2i4.119>
- Handayani, T. (2015). RELEVANSI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI ERA GLOBAL. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i1.57>
- Hasan, M. I., Murtini, T. W., & Sari, S. R. (2015). The application of sustainable architecture in Islamic University. *Advances in Environmental Biology*.
- Herodotou, C., Winters, N., & Kambouri, M. (2012). A motivationally oriented approach to understanding game appropriation. *International Journal of Human-Computer Interaction*. <https://doi.org/10.1080/10447318.2011.566108>
- Indrajaya, F. (2017). APROPRIASI DAN REKONTEKSTUALISASI HISTORIS STUDIDASAR RUPA SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN DASAR DESAIN. *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*. <https://doi.org/10.25105/dim.v14i1.2328>
- Kim, N., & Song, S. (2021). *A Qualitative Exploration into Consumers' Perceptions and Experiences with Cultural Appropriation*. <https://doi.org/10.31274/itaa.11923>
- Kromydas, T. (2017). Rethinking higher education and its relationship with social inequalities: Past knowledge, present state and future potential. *Palgrave Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-017-0001-8>
- Leko, M. M., & Brownell, M. T. (2011). Special education preservice Teachers' appropriation of pedagogical tools for teaching reading. *Exceptional Children*. <https://doi.org/10.1177/001440291107700205>
- Mifsud, M., Cases, A. S., & N'Goala, G. (2015). Service appropriation: how do customers make the service their own? *Journal of Service Management*. <https://doi.org/10.1108/JOSM-04-2015-0136>
- Nasrudin, D., Helsy, I., Rochman, C., Irwansyah, F. S., Munir, & Mahmud. (2019). Science education at Islamic university: Vision and distinction. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1280/3/032060>
- Rofiq, M. H., & Ridwan, R. A. (2019). MENANGKAL RADIKALISME MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS ASWAJA NAHDLATUL ULAMA'. *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.33474/ja.v1i1.2713>
- Rumbley, L. E., Stanfield, D. A., & de Gayardon, A. (2014). From inventory to insight: making sense of the global landscape of higher education research, training, and publication. *Studies in Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/03075079.2014.949546>
- Sakhiyya, Z., & Rata, E. (2019). From 'priceless' to 'priced': the value of knowledge in higher education. *Globalisation, Societies and Education*. <https://doi.org/10.1080/14767724.2019.1583089>
- Tight, M. (2021). Globalization and internationalization as frameworks for higher education research. *Research Papers in Education*. <https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1633560>
- Ulum, I., & Novianty, N. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Intellectual Capital Pada Official Website Perguruan Tinggi Indonesia. *Jurnal Dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*.

- Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2020). Towards an immanent ontology of teaching Leonard Bernstein as a case-study. *Ethics and Education*. <https://doi.org/10.1080/17449642.2019.1700444>
: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/72/1/ANI%20ANJANI.pdf>, dikutip tanggal 20 Maret 2021).
- Würfel, M. (2014). Transmedia appropriation and socialization processes among German adolescents. *International Journal of Communication*.
- Žalėnienė, I., & Pereira, P. (2021). Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>